

# Perkelahian Massal Pelajar Antarsekolah di Jakarta Selatan

## Sebuah Studi Kasus Berganda: Rekonstruksi berdasarkan Paradigma Konstruksivisme

**Muhammad Mustofa**

### **ABSTRACT**

*This research examines mass fighting instances among high school students in Jakarta, which has been existing since 1970s up to now. Mass fighting instances were studied as collective behavior phenomena. Thus its unit of analysis are collectivities, i.e. groups of high school students who are involved in the incidence of mass fighting.*

*The analysis model developed in this research was derived from Smelser's as well as Tilly's theories on collective behavior. As a consequence the analysis of mass fighting has four components: i.e. conflict tradition, ability for mobilization, precipitated factors, and opportunity which should be found simultaneously in every incidence.*

*Research method used was a multiple-case study as based for the reconstruction of the reality of mass fighting. To conduct this method, high school student collectivities were divided into three categories, i.e. fighting group of high school with conflict tradition, non-fighting group of a high school with conflict tradition, and non-fighting group of high school without conflict tradition. Each group were represented by 50 male students, who were selected incidentally.*

*Research results suggest that the differences found between fighting group with non-fighting group rooted in whether or not the components of mass fighting were existed. Such differences lead to the differences in their subjectivity in constructing reality. Since individual of students from different group (of this research) reveal social-economics differences, as a consequence their life experience, opportunity, and expectation were also different. They will comprehend and react differently when they face similar situational problems existed in every incidence of mass fighting.*

### **Latar Belakang Permasalahan**

Keadaan masyarakat yang terintegrasi seringkali terusik oleh peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu kestabilannya. Misalnya wilayah DKI Jakarta dalam beberapa tahun ini ditandai oleh munculnya peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah, khususnya di antara pelajar-pelajar SLTA. Harian Kompas (2 November 1992, 14 Februari 1996, dan 13 Mei 1996) melaporkan bahwa menurut catatan polisi, jumlah peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah di DKI Jakarta dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 1989 terjadi 80 peristiwa perkelahian massal pelajar dan pada tahun 1991 sudah menjadi sebanyak 260

peristiwa. Jumlah pelajar yang ditangkap karena terlibat dalam peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah pada tahun 1989 sebanyak 193 orang, dan pada tahun 1995 telah menjadi 1.245 orang. Demikian juga jumlah pelajar yang ditahan karena terlibat peristiwa tersebut terjadi peningkatan yang pada tahun 1989 hanya sebanyak 82 orang, pada tahun 1995 menjadi 1.236 orang. Jumlah pelajar yang dilaporkan tewas sebagai akibat dari peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah terlihat adanya peningkatan. Pada tahun 1989 tercatat 6 orang tewas, pada tahun 1995 menjadi 13 orang.

Timbulnya peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut di atas, yang dianggap telah merisaukan masyarakat

dan merupakan gangguan keamanan dan ketertiban, telah mendorong berbagai pihak (ABRI, Polri, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda DKI Jakarta) untuk terlibat dalam usaha penanggulangannya. Kendati pun berbagai bentuk program penanggulangan perkelahian massal pelajar antar sekolah sudah dilakukan, namun sampai dengan tahun 2000, masalah tersebut tak kunjung terselesaikan.

Pertanyaan yang dapat dikemukakan atas gejala tersebut adalah: apakah peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah sudah merupakan gejala sosial yang tidak normal, ataukah sekedar merupakan reaksi berlebihan dari pranata penegakan hukum dan agen-agen pengendalian sosial lainnya yang dengan panik bereaksi secara tidak mendasar? Yang jelas adalah, pemahaman yang mendasar dan menyeluruh tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah belumlah memadai. Sebab, kalau peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah selalu muncul setiap tahunnya dan sepanjang tahun, hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat suatu kondisi yang relatif menetap yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, dan bukan semata-mata adanya faktor kelainan atau kekurangan yang ada pada diri para pelajar yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

Selama ini dalam rangka mengantisipasi gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah, terdapat kecenderungan mencari akar masalahnya pada diri individu para pelajar yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa perkelahian massal tersebut. Menurut Tannenbaum (1938) keadaan ini merupakan "dramatization of evil" yang justru akan memperkuat kecenderungan penyimpangan. Selain itu dengan hanya mencari akar masalah pada diri individu-individu pelajar yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar, juga akan cenderung mendorong upaya pencarian faktor-faktor yang dianggap negatif saja yang diduga terdapat pada diri para individu pelajar tersebut. Oleh Kingsley Davis kesalahan kecenderungan

mencari akar masalah penyimpangan pada hal-hal yang dianggap buruk saja disebut sebagai "evil causes-evil fallacy" (Lihat Cohen, 1951:5-13), yang tentu saja tidak obyektif dan patut dihindari dalam suatu kajian ilmiah. Uraian di atas telah mendorong untuk dilakukannya suatu penelitian ilmiah tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang gejala tersebut.

## Permasalahan

Penelitian ilmiah yang pernah dilakukan terhadap gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah selama ini didominasi oleh penelitian-penelitian psikologis yang menekankan aspek individual pelajar yang terlibat di dalamnya. Misalnya penelitian oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1991) menekankan pada peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi perkelahian pelajar. Kemudian penelitian oleh Amarina Ariyanto dan Sri Fatmawati (1993) menekankan pada pengaruh "belief" terhadap niat untuk terlibat dalam perkelahian. Penelitian-penelitian tersebut tidak mampu menunjukkan proses terjadinya perkelahian massal pelajar antar sekolah maupun konteks sosial dari peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut.

Harian Kompas, pada tahun 1993, melalui "polling" yang dilakukan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangannya meneliti pelajar di Jabotabek tentang tawuran menyimpulkan bahwa pelajar yang mengaku terlibat dalam tawuran berasal dari keluarga yang hubungan dalam keluarganya harmonis. Dengan demikian kenyataan ini tidak berbeda dari asal keluarga pelajar yang tidak terlibat tawuran (Kompas, 14 April 1993). Selanjutnya faktor yang ditemukan mempunyai hubungan korelatif dengan keterlibatan pelajar dalam tawuran adalah prestasi akademiknya yang menunjukkan bahwa pelajar yang terlibat tawuran menduduki peringkat dalam kelas antara 16 hingga 50 (Kompas, 15 April 1993).

Faktor lain yang perlu diperhatikan yang juga ditemukan oleh Kompas adalah waktu luang pelajar yang tidak terisi oleh kegiatan positif (Kompas, 16 April 1997). Kendati pun penelitian Kompas menunjukkan temuan-temuan yang berharga namun penelitian tersebut tidak mampu menjelaskan gejala tawuran yang sifatnya massal atau melibatkan jumlah individu yang banyak dalam tingkah laku kekerasan tersebut.

Ketidackukupan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh atas peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang mampu mengungkap gejala tersebut secara lebih komprehensif dengan menempatkannya dalam konteks sosial budaya yang ada. Selain itu penelitian ini dituntut juga untuk mampu mempertanggungjawabkan temuannya dalam aspek teoritisnya mau pun metodologisnya, sebab sampai saat ini masih sulit dicari hasil penelitian yang handal dan valid dalam mengkaji gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian di muka maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah menunjukkan intensitas yang meningkat. Namun meski pun sudah dilakukan berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai pranata pengendalian sosial, tak satupun yang membuahkan hasil. Ketidakberhasilan berbagai upaya pengendalian sosial ini disebabkan tidak dipahaminya gejala tersebut secara komprehensif sesuai dengan konteks sosial dan wilayah perkotaan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah.

Sementara itu kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pelajar dan tidak semua sekolah pelajarnya terlibat dalam perkelahian massal pelajar antar sekolah. Ini menunjukkan bahwa aspek lembaga sekolah sangat berperan dalam terjadinya gejala perkelahian massal pelajar. Oleh karena itu diperlukan pula

pemahaman atas kenyataan ini agar supaya pengalaman pelajar yang tidak terlibat dalam gejala yang dipermasalahkan ini dan pengalaman sekolah yang siswanya tidak terlibat dalam gejala tersebut dapat dijadikan landasan upaya penanggulangan masalah.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terjadinya perkelahian massal pelajar antar sekolah?

2. Mengapa tidak semua pelajar dan tidak semua sekolah pelajarnya terlibat dalam peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya perkotaan, khususnya kota metropolitan Jakarta sekarang ini. Secara lebih khusus penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu:

a. berusaha mencari pemahaman ilmiah tentang bagaimanakah proses terjadinya perkelahian massal pelajar antar sekolah;

b. berusaha memperoleh pemahaman ilmiah tentang mengapa terdapat sekolah yang siswanya cenderung sering terlibat dalam perkelahian massal pelajar antar sekolah dibandingkan sekolah lain pada umumnya.

Kegunaan penelitian ini dalam aspek teoritisnya diharapkan menghasilkan suatu teori yang mampu menjelaskan gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah. Kendati pun gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah termasuk dalam kategori tingkah laku kolektif, namun teori-teori tingkah laku kolektif yang relevan untuk mengkaji gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah mempunyai kegunaan yang terbatas. Masing-masing teori hanya dapat dipergunakan pada salah satu tahapan dalam proses terjadinya perkelahian massal pelajar antar sekolah saja. Sementara itu teori-teori tersebut belum

banyak memperoleh dukungan data empiris melalui suatu penelitian. Oleh karena itu secara metodologis penelitian yang dilakukan diharapkan pula mampu menunjukkan prosedur dan tata cara yang dapat menghasilkan data yang dapat diverifikasi keabsahan dan kebenarannya oleh peneliti lain.

Dengan diperolehnya pemahaman komprehensif atas gejala yang diteliti, maka apabila diperlukan untuk keperluan praktis, maka hasil penelitian ini akan dapat dijadikan kerangka acuan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan masalah perkelahian massal pelajar antar sekolah.

## Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

Perkelahian massal pelajar antar sekolah adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang terjadi antara dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah yang satu sama lain mempunyai perasaan permusuhan atau persaingan. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terwujud dalam bentuk ancaman untuk menggunakan kekerasan, saling melempari dengan batu atau benda-benda lain, memukul lawan atau saling memukul baik dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata tajam atau tumpul, merampas barang-barang milik lawan.

Penelitian ini menempatkan gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah sebagai gejala tingkah laku kolektif karena dalam gejala tersebut terdapat unsur massal (kolektif), yakni adanya sejumlah pelajar yang tergabung dalam satu kelompok atau kerumunan. Sifat kerumunan tersebut tidak terstruktur seperti terstrukturnya sebuah organisasi modern, dan oleh karenanya tidak terdapat pemimpin yang tetap. Kalau dalam suatu episode perkelahian massal terdapat seseorang yang bertindak sebagai pemimpin, pemimpin ini hanya berperan selama perkelahian massal berlangsung saja.

Istilah-istilah yang dipergunakan untuk

menyebut tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, yang tindakan tersebut berbeda dari pola tingkah laku masing-masing individu pemeransertanya sangat beragam. Keadaan itu disebut sebagai tingkah laku kolektif (*collective behavior*), tindakan kolektif (*collective action*), tindakan bersama (*joint action*), dinamika kolektif (*collective dynamic*), yang kesemuanya mempunyai makna yang sama. Akan tetapi definisi-definisi tersebut meliputi gejala tingkah laku kolektif yang sangat luas, seperti kepanikan, gerakan sosial, revolusi, pemogokan, bahkan termasuk cita rasa dan mode (Lihat misalnya, Blumer, 1969; Smelser, 1971; Lang dan Lang, 1968; Turner, 1980).

Dalam lingkup kajian perkelahian massal pelajar antar sekolah, secara lebih khusus gejala tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif. Charles Tilly (1969) mengategorikan kekerasan kolektif dalam tiga kategori yaitu: *kekerasan kolektif primitif*, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang tidak bersifat politis dan luas lingkungannya terbatas pada komunitas lokal saja. Misalnya kerusuhan, main hakim sendiri secara kolektif. *Kekerasan kolektif reaksioner*, merupakan protes atau perlawanan terhadap sistem dalam bentuk kekerasan massal sebagai reaksi terhadap cara-cara penguasa dalam melakukan tugasnya. *Kekerasan modern*, adalah kekerasan massal yang diorganisasi untuk tujuan politik dan ekonomi. Misalnya pemogokan buruh, pengambilalihan kekuasaan yang sah, perang gerilya, terorisme (Lihat Moyer, 1983: 1619-1620).

Kekerasan kolektif dapat juga dilihat sebagai tindakan pengendalian sosial swadaya (*self help*) sebagaimana dikatakan oleh de la Roche (1996) dan Black (1995). Menurut Black, tindakan pengendalian sosial dalam bentuk kekerasan kolektif tersebut tergantung pada lokasi sosial dan arah konflik, serta posisi relatif pihak-pihak yang berkonflik, misal setara atau tidak, saling kenal atau orang asing, berasal dari satu kebudayaan atau tidak (Black, 1995:829-870).

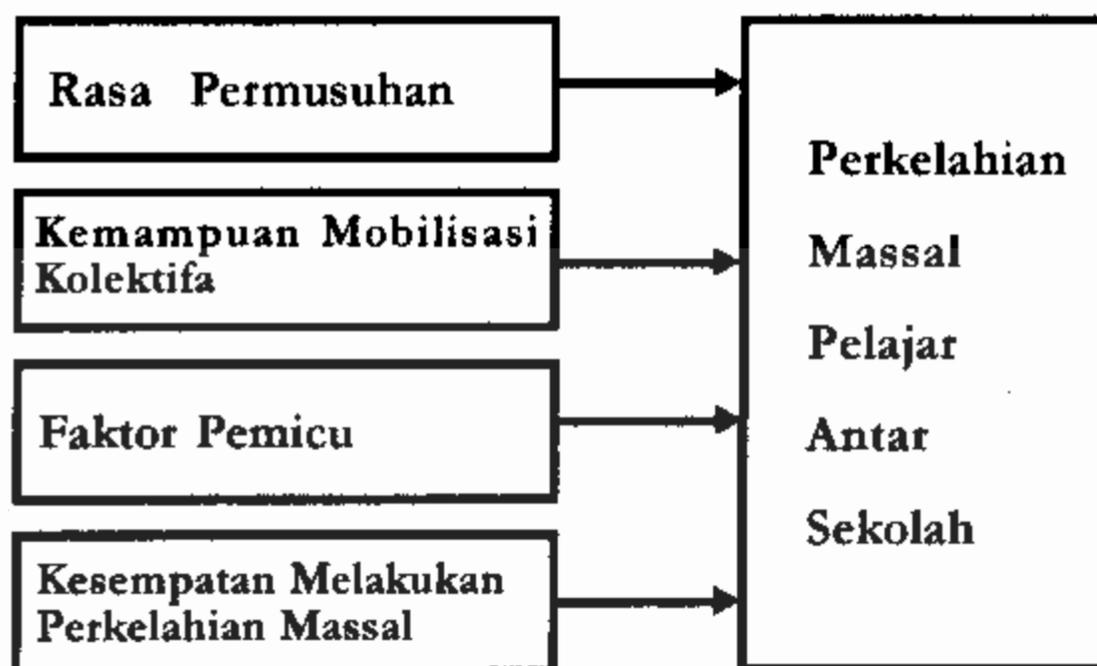
Gejala kekerasan kolektif kendati pun kurang mendapat perhatian oleh bidang sosiologi mau pun kriminologi, namun para pemikir klasik sosiologi sudah memberikan perhatian pada gejala tersebut. Pemikiran Marx tentang tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte" (1958), dan "The Class Struggles in France" (1958) berdasarkan kajiannya terhadap Revolusi Perancis 1848 yang melihat tindakan kolektif sebagai tindakan kelas dalam rangka memperjuangkan kepentingan kelas menghadapi kelas borjuasi. Sementara itu pemikiran Durkheim tentang gejala tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "The Division of Labor in Society" (1933), "Suicide" (1951), dan "The Elementary Forms of the Religious Life" (1961). Durkheim berpendapat bahwa masyarakat akan selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi dan dorongan integrasi. Ketidakselarasan antara kepercayaan bersama dengan adanya perbedaan-perbedaan menghasilkan tiga bentuk tindakan kolektif, yaitu tindakan kolektif rutin, tindakan kolektif restoratif, dan tindakan kolektif anomik (Tilly, 1978:18). Weber, kendatipun berpendapat tingkah laku kolektif bukan merupakan bidang studi sosiologi, ia mengatakannya sebagai suatu tingkah seseorang yang timbul semata-mata dipengaruhi oleh orang lain, misalnya situasi panik atau kerumunan yang muncul tiba-tiba karena adanya "sugesti massa", tingkah laku para individu tersebut dipengaruhi oleh kenyataan bahwa orang-orang lain bertingkah laku secara tertentu dalam situasi tersebut (Weber, 1968:1378).

Dalam penelitian ini syarat keadaan yang mencukupi (sufficient condition) bagi terbentuknya tingkah laku kolektif akan dicari penjelasannya melalui konsep "the social construction of reality" (Berger, Luckmann, 1967). Tingkah laku perkelahian massal, mengikuti konsep ini, merupakan realitas sosial yang dibangun oleh para pelajar yang terlibat

di dalamnya. Terbentuknya realitas sosial tersebut terbentuk sebagai hasil interaksi dialektis dengan dunia kenyataan pelajar yang menghasilkan pemahaman subyektif dari para individu dan karena pengalaman para pelajar tersebut relatif sama akan terbentuk realitas intersubyektifitas.

Dalam menjelaskan gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah secara lebih sistematis yang merupakan kondisi prasyarat (nessecary conditions), digunakan model penjelasan yang dikembangkan oleh Smelser dalam Theory of Collective Behavior (1962) dan Charles Tilly dalam From Mobilization to Revolution (1978). Smelser menyebutkan adanya faktor-faktor determinan bagi timbulnya tingkah laku kolektif yang meliputi pendorong struktural, ketegangan struktural, penyebarluasan kepercayaan umum, pencetus, mobilisasi, dan bekerjanya pengendalian sosial. Tingkah laku kolektif terjadi karena adanya kelompok yang mengalami ketegangan terakumulasi dengan faktor determinan lain melalui proses nilai tambah. Tilly dalam pola yang sama menyebutkan adanya komponen-komponen tingkah laku kolektif yang meliputi adanya kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri.

Model penjelasan Smelser dan Tilly tersebut diadopsi untuk disesuaikan bagi gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah menjadi adanya faktor-faktor rasa permusuhan, kemampuan mobilisasi kolektif, pemicu, dan kesempatan. Keseluruhan faktor tersebut harus terakumulasi bagi terjadinya perkelahian massal dan bukan merupakan faktor yang masing-masing berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana akumulasi faktor-faktor yang ada dalam peristiwa perkelahian massal disajikan pada bagan berikut ini [Gambar 1].



[ Gambar 1 ]

## Metodologi Penelitian

Untuk memahami gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah yang hampir tidak mungkin diamati dan diikuti secara langsung proses terjadinya, dilakukan rekonstruksi proses terjadinya gejala tersebut. Di samping itu perlu juga dipahami makna subyektif perkelahian massal tersebut bagi para aktornya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode studi kasus berganda agar diperoleh data yang lengkap menunjukkan kompleksitasnya.

Para pelajar yang diteliti dikelompokkan dalam tiga kelompok sesuai dengan hakekat kecenderungan mereka dalam perkelahian massal menjadi: (a) kelompok pelajar terlibat perkelahian massal dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian massal, (b) kelompok pelajar yang tidak terlibat perkelahian massal dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian massal, dan (c) kelompok pelajar tidak terlibat perkelahian massal dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi perkelahian massal. Melalui pengelompokan ini dimaksudkan pula sebagai salah satu usaha rekonstruksi kolektifa pelajar yang merupakan unit analisa penelitian ini. Masing-masing kelompok terdiri dari 50 orang pelajar laki-laki. Untuk pelajar dari sekolah

yang mempunyai tradisi perkelahian massal dipilih secara accidental dengan dipisahkan antara yang mengaku pernah terlibat perkelahian massal dengan yang mengaku tidak pernah terlibat dalam peristiwa itu. Sementara itu untuk kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi perkelahian massal dipilih secara accidental dengan tidak menanyakan apakah mereka pernah atau tidak pernah terlibat dalam perkelahian massal.

Penentuan sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah dengan tradisi perkelahian massal (dalam penelitian ini ditetapkan dua sekolah yang saling bermusuhan) dan sekolah tidak dengan tradisi perkelahian massal (ditetapkan satu sekolah) didasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Selatan, khususnya Kebayoran Baru, memang merupakan wilayah yang dipilih untuk penelitian ini karena secara sistematis Kepolisian Resor Jakarta Selatan melakukan pendokumentasian kasus-kasus perkelahian massal pelajar di wilayah itu sehingga memudahkan pemahaman awal atas gejala tersebut.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam berdasarkan kuesioner yang dilaksanakan oleh para mahasiswa yang ciri fisiknya tidak terlalu berbeda dari pelajar

SLTA. Penggunaan pewawancara dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti mempunyai ciri fisik yang berbeda dari pelajar SLTA. Perbedaan ini akan menjadi kendala untuk memperoleh informasi yang terbuka yang berkaitan dengan perkelahian massal yang pada dasarnya merupakan tindakan pelanggaran hukum. Untuk memastikan bahwa pengumpul data memahami pedoman wawancara yang dijadikan pegangan untuk memperoleh informasi dari pelajar, dilakukan pelatihan terhadap mereka.

## Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Kelompok pelajar dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian massal merasa mempunyai musuh pelajar sekolah lain. Sementara itu kelompok pelajar yang tidak mempunyai tradisi perkelahian massal tidak menunjukkan kecenderungan yang sama.

Tradisi permusuhan dengan pelajar sekolah lain merupakan unsur yang selalu terdapat pada sekolah-sekolah yang siswanya mempunyai keterlibatan tinggi dalam perkelahian massal pelajar antar sekolah. Adanya rasa permusuhan tersebut merupakan pengakuan dari keseluruhan kasus yang berasal dari sekolah dengan tradisi permusuhan (baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perkelahian massal). Sementara itu kasus pelajar dari sekolah tanpa keterlibatan perkelahian massal pelajar antar sekolah, lebih separuh yang mengakui tidak punya musuh.

Uraian ini dapat dikonfirmasi pada Tabel 1 di bawah ini.

Meskipun data pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa Kelompok C yang merupakan kelompok non-perkelahian dari sekolah tanpa tradisi perkelahian massal juga mempunyai siswa yang merasa mempunyai musuh pelajar sekolah lain, namun mereka dalam konteks perkelahian massal lebih sering merupakan kelompok korban atau sasaran penyerangan dari kelompok pelajar yang sering terlibat perkelahian massal. Dalam setiap peristiwa penyerangan secara massal terhadap Kelompok C, pelajar-pelajar dari Kelompok C cenderung menghindari dan tidak melakukan perlawanan. Kesimpulan ini didukung oleh data selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi permusuhan. Tradisi permusuhan yang merupakan aspek mendasar bagi konflik sosial ini telah diidentifikasi oleh Park dan Burges (1921) maupun Kriesberg (1973) yang keberadaannya selalu disadari oleh pendukungnya.

2. Tradisi permusuhan terhadap kelompok pelajar lain merupakan rasa permusuhan yang diwariskan. Penanaman rasa permusuhan tersebut dimulai semenjak siswa baru kelas 1 mengikuti masa penataran.

Semua kasus yang mengakui mempunyai musuh pelajar dari sekolah lain menyatakan bahwa mereka mempunyai rasa permusuhan tersebut semenjak masuk sekolah tersebut. Dalam kaitan ini pengaruh dari kakak kelas (senior) yang menanamkan rasa permusuhan kepada siswa yang baru masuk mempunyai peranan penting dalam membentuk rasa

**Tabel 1**

### Ada tidaknya pelajar sekolah lain yang dianggap musuh

Status interaksi	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Punya musuh	50	49	21
Tak ada musuh	-	1	29

Keterangan:

A. Kelompok perkelahian dari sekolah dengan tradisi perkelahian massal.

B. Kelompok non-perkelahian dari sekolah dengan tradisi perkelahian massal.

C. Kelompok non-perkelahian dari sekolah tanpa tradisi perkelahian massal.

permusuhan tersebut. Sosialisasi rasa permusuhan tersebut dimulai pada minggu pertama ketika siswa baru mulai belajar di sekolah tersebut yang biasanya diisi dengan acara "penataran". Pada acara penataran yang bentuknya lebih mirip sebagai acara perpeloncoan, para kakak kelas (senior) menanamkan perasaan permusuhan terhadap pelajar sekolah lain dengan menyebutkan bahwa sekolah-sekolah lain adalah musuh mereka secara turun temurun. Oleh karena itu musuh turun temurun tadi juga harus dimusuhi oleh siswa yang baru masuk. Bahkan sebagai usaha untuk membuat bahwa permusuhan tersebut adalah nyata, siswa kelas satu yang baru masuk diajak atau dipaksa oleh kakak-kakak kelasnya untuk menyerang sekolah yang mereka anggap sebagai musuhnya. Akibat penanaman rasa permusuhan dengan menanamkan kepercayaan bahwa pelajar sekolah lain adalah musuh turun temurun, mereka akan saling menyerang.

Kesadaran adanya permusuhan dengan pihak lain bukanlah merupakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Kesadaran permusuhan terjadi melalui suatu proses sosialisasi. Proses penanaman rasa permusuhan di antara pelajar suatu sekolah ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk wacana. Peranan dari wacana bagi dilakukannya tingkah laku kolektif telah pula diidentifikasi oleh sejumlah sarjana sebelumnya (misal: Klandermans, 1992; Tarrow, 1994; Hunt, Benford, dan Snow, 1994; Elinson,

1995). Data empiris yang tersaji pada Tabel 2, mendukung uraian di atas.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok A (kelompok berkelahi dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian massal) mengakui bahwa rasa permusuhan yang mereka lakukan terhadap kelompok pelajar sekolah lain merupakan warisan dari seniornya. Alasan ini dikemukakan oleh 33 kasus yang merupakan pernyataan yang terbanyak pada Kelompok A. Kecenderungan merasa bahwa permusuhan yang dilakukan merupakan warisan melemah pada Kelompok B (kelompok tidak berkelahi dari sekolah dengan tradisi perkelahian massal) menjadi 23 kasus, dan lebih melemah lagi pada Kelompok C yang hanya ditemukan pada 9 kasus. Pada kelompok C yang merupakan kelompok pelajar yang berasal dari sekolah tanpa tradisi perkelahian, kecenderungan yang paling kuat tentang alasan permusuhan adalah tidak memusuhi. Pernyataan ini dikemukakan oleh sebagian besar anggota Kelompok C atau 32 kasus.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut pada data di atas menunjukkan bahwa Kelompok A dan Kelompok B yang berasal dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian massal, alasan permusuhan yang mendominasi pernyataan mereka adalah karena warisan. Tidak ditemukan adanya alasan nyata dalam permusuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa permusuhan sudah merupakan tradisi yang terbentuk melalui proses sosialisasi.

**Tabel 2**  
**Alasan bermusuhan**

Alasan bermusuhan	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Warisan	33	23	9
Membela diri	15	17	8
Solider pada teman	2	1	1
Persaingan	-	1	-
Tidak memusuhi	-	8	32
Jumlah total	50	50	50

Pernyataan membela diri dan solider pada teman pada Kelompok A dan Kelompok B pada dasarnya merupakan hasil dari proses sosialisasi permusuhan, namun dikemukakan secara berbeda.

Pernyataan-pernyataan dari kasus yang dapat dikategorikan sebagai alasan permusuhan warisan antara lain adalah: "sudah dari dulu musuhannya", "sudah kebiasaan dari dulu, tanpa persoalan yang jelas", atau dengan singkat hanya dinyatakan "sudah dari dulu", "sudah bermusuhan dari dulu", dan "warisan dari senior". Tradisi permusuhan seperti ini menurut Coser (1956) bukan merupakan konflik yang realistis tetapi sekedar merupakan kebutuhan pelepas ketegangan. Dengan kata lain permusuhan yang terjadi antar pelajar antar sekolah lebih cenderung merupakan katup pengaman atas ketegangan dalam konteks yang lebih luas yaitu struktur sosial yang melingkupinya yang oleh para pelajar tidak dapat dirumuskan secara jelas.

Sementara itu pernyataan-pernyataan yang dikategorikan sebagai pembelaan diri (Kelompok A 15 kasus, Kelompok B 17 kasus, Kelompok C 8 kasus) meliputi antara lain: "mereka memusuhi kami", "mereka yang membuat gara-gara duluan, menyetang", "mereka yang mulai memusuhi", atau "mereka suka cari gara-gara, ngledekin". Pernyataan tentang pembelaan diri pada Kelompok A dan B dapat dikatakan merupakan petunjuk bahwa perkelahian massal merupakan tindakan "self help" sebagaimana dikemukakan oleh de la Roche (1990) atau menurut Black (1995). Sedangkan Pernyataan-pernyataan pembelaan diri yang juga ditemukan pada Kelompok C lebih mencerminkan bahwa mereka merasa tidak bermusuhan.

Sifat permusuhan yang dirasakan oleh para pelajar dalam konteks perkelahian massal pelajar antar sekolah bersifat kolektif dan bukan merupakan permusuhan pribadi. Konstruksi ini dapat dirumuskan berdasarkan penuturan kasus-kasus yang menyatakan bahwa permusuhan tersebut "karena bawa nama sekolah", "tradisi yang diwariskan dari

dulu", atau "dikasih tahu senior". Permusuhan yang bersifat kolektif dan turun temurun tersebut pada akhirnya akan menumbuhkan "counter culture" yaitu suatu nilai solidaritas yang perwujudannya dalam bentuk pembenaran tindakan kekerasan terhadap kelompok pelajar lain yang dianggap musuh.

Rasa permusuhan pelajar tersebut sudah tentu membutuhkan sasaran yang konkrit. Menurut Coser (1956) permusuhan hanya dapat terjadi dalam kerangka interaksi antara dua pihak. Dalam kaitan ini kelompok pelajar dari sekolah-sekolah yang mempunyai tradisi permusuhan, tanpa membedakan apakah mereka terlibat dalam perkelahian massal atau tidak, mempunyai musuh yang lebih banyak dibandingkan pelajar dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi perkelahian. Kenyataan ini dapat disimak dari Tabel 3 di bawah ini yang menunjukkan data tentang pelajar dari sekolah yang terpilih dalam penelitian ini.

Tabel 3

Banyaknya sekolah lain yang dianggap musuh

Sekolah I	Sekolah II	Sekolah III
17	26	5

Keterangan:

Sekolah I dan II merupakan sekolah dengan tradisi perkelahian massal.

Sekolah III merupakan sekolah tanpa tradisi perkelahian massal.

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekolah I dan II yang mempunyai tradisi perkelahian massal mengaku mempunyai musuh kelompok pelajar sekolah lain dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari Sekolah III yang tidak mempunyai tradisi perkelahian massal. Meskipun pelajar Sekolah III menunjukkan adanya sekolah lain yang dianggap musuh, namun dalam perkelahian massal mereka merupakan pihak korban atau yang menjadi sasaran. Sikap pasif pelajar Sekolah III dalam perkelahian massal dapat dikaitkan dengan pola pembinaan yang ditetapkan oleh sekolah, yakni adanya sanksi dikeluarkan dari sekolah bila terlibat perkelahian massal. Sementara itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi dari pelajar sekolah ini yang dituntut untuk

berprestasi secara akademik oleh orang tuanya, sekolah menjadi mempunyai makna tinggi untuk mencapai sukses.

3. Kelompok pelajar yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk terlibat dalam perkelahian massal mempunyai perasaan kurang aman ketika mereka pergi ke dan pulang dari sekolah. Perasaan kurang aman tersebut tidak terlihat pada kelompok pelajar yang tidak terlibat dalam tindakan serupa.

Tradisi permusuhan yang merupakan permusuhan kolektif, sebagaimana diuraikan di atas, masih merupakan permusuhan laten yang tersembunyi dan baru akan muncul sebagai permusuhan nyata dalam situasi-situasi yang khusus saja. Seperti dikemukakan oleh Dahrendorf (1959) bahwa konflik mungkin saja tersembunyi dan tidak diketahui oleh pemeransertanya tetapi tetap ada.

Tradisi permusuhan dalam salah satu proses manifestasinya menjadi nyata adalah timbulnya rasa takut akan gangguan keamanan dari pelajar sekolah lain yang dianggap musuhnya. Berdasarkan data tentang rasa aman ketika berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah, rasa ketakutan ancaman musuh tersebut lebih nyata pada kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 4 di bawah ini.

Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelajar dengan tradisi berkelahi yang berasal dari sekolah dengan tradisi perkelahian (Kelompok A) merasa lebih tidak aman ketika berangkat menuju ke sekolah atau pulang dari sekolah dibandingkan pelajar dari sekolah yang sama tetapi tidak mempunyai tradisi berkelahi (Kelompok B). Lebih jauh lagi perasaan tidak aman menjadi

paling kecil pada kelompok pelajar tanpa tradisi berkelahi dari sekolah tanpa tradisi perkelahian massal (Kelompok C).

Alasan yang menonjol bagi kelompok berkelahi bahwa mereka merasa tidak aman adalah "banyak musuh", atau "daerah yang dilewati rawan musuh", atau takut ketemu musuh". Rasa tidak aman yang dirasakan anggota Kelompok C didominasi oleh pernyataan "rute pergi/pulang sekolah paling banyak terdapat anak-anak sekolah lain nongkrong". Pernyataan ini memperkuat petunjuk bahwa Kelompok C lebih merupakan kelompok korban sasaran dari kelompok pelajar yang mempunyai tradisi perkelahian.

Rasa aman yang cukup menonjol pada kelompok berkelahi (Kelompok A) sesungguhnya masih terkait dengan perasaan permusuhan bahkan merupakan antisipasi bila menghadapi musuh. Pada umumnya mereka merasa aman karena mereka "selalu bareng teman-teman" ketika berangkat menuju ke sekolah atau pulang dari sekolah. Rasa aman pada Kelompok B didominasi oleh pernyataan "jalan yang dilewati relatif aman", dan pergi/pulang sekolah naik motor. Pada Kelompok C yang bukan merupakan kelompok berkelahi rasa aman dirumuskan dengan alasan yang bervariasi, misalnya "tidak mempunyai masalah dengan orang lain", "rute aman", dan "banyak teman pulang/pergi sekolah".

4. Kelompok pelajar yang sering terlibat dalam perkelahian massal mempunyai kecenderungan membentuk kerumunan di sekitar sekolah ketika usai jam sekolah. Dalam kerumunan mereka terbentuk "cultural focus" permusuhan. Oleh karena itu kerumunan ini merupakan tipe kerumunan kekerasan.

Kerumunan merupakan modal untuk

**Tabel 4**

**Rasa aman menuju ke / pulang dari sekolah**

Keadaan perasaan	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Merasa tidak aman	31	24	20
Merasa aman	19	26	30

melakukan perkelahian massal, karena dalam perkelahian massal perlu adanya mobilisasi anggota. Kemampuan untuk memobilisasi pelajar ditelusuri berdasarkan kebiasaan mereka setelah usai sekolah serta kegiatan yang mereka lakukan, apakah kebiasaan dan kegiatan mereka memungkinkan terbentuknya kerumunan pelajar yang merupakan faktor penting bagi dilakukannya perkelahian massal. Kegiatan rutin pelajar setelah usai jam pelajaran sekolah menunjukkan kecenderungan membentuk kerumunan karena sebagian besar menyatakan bahwa se usai jam pelajaran sekolah biasanya mereka berkumpul (nongkrong) dulu dengan teman-temannya di sekitar sekolah atau di satu tempat yang biasa mereka pergunakan untuk berkumpul. Hanya sebagian kecil pelajar saja yang usai jam pelajaran sekolah langsung pulang ke rumah. Dalam kaitan ini Turner (1980) mengatakan bahwa kerumunan lebih terkonsentrasi pada waktu dan tempat. Tabel 5 di bawah ini merupakan sajian kebiasaan pelajar begitu usai jam pelajaran sekolah yang berkaitan dengan terbentuknya kerumunan.

Data di atas menunjukkan bahwa para pelajar baik Kelompok A (Kelompok berkelahi dari sekolah dengan tradisi perkelahian massal) maupun Kelompok C (Kelompok tidak berkelahi dari sekolah tanpa tradisi perkelahian massal) mempunyai kecenderungan kuat membentuk merumunan ketika usai jam pelajaran sekolah. Namun ternyata kerumunan-kerumunan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap dilakukannya perkelahian massal. Perbedaan kerumunan tersebut dapat ditemukan pada "cultural focus" yang terbentuk pada kerumunan-kerumunan tersebut. Pada Kelompok A, ketika

membentuk kerumunan mereka melakukannya lebih untuk membuang waktu, iseng, cuci mata, mengganggu "cewek" lewat, bahkan dipergunakan untuk menyusun strategi menghadapi musuh. Sementara itu pada Kelompok C, dalam kerumunan yang terbentuk usai jam pelajaran sekolah mereka membicarakan masalah organisasi, mengerjakan PR, atau mendiskusikan berita-berita hangat.

Perbedaan "cultural focus" antara Kelompok A dengan Kelompok C dan kaitannya dengan perkelahian massal pelajar dapat dijelaskan dengan mempergunakan konsep Turner (1980) tentang kerumunan aktif dan kerumunan ekspresif. Kerumunan pelajar dari Kelompok A yang terbentuk usai jam sekolah, menurut istilah Turner, merupakan kerumunan ekspresif yang terbentuk karena adanya keresahan sosial dan frustrasi, atau dalam konteks penelitian ini para pelajar tersebut mempunyai rasa permusuhan. Namun dalam kerumunan ekspresif tersebut tidak teridentifikasi adanya obyek yang menjadi sasaran keresahan. Kerumunan ekspresif ini akan berubah menjadi kerumunan aktif apabila mereka mengidentifikasi sasaran permusuhan yakni adanya kelompok pelajar lain yang dianggap musuhnya. Dalam kaitan ini Coser (1956) mengatakan bahwa adanya konflik dengan kelompok lain akan mengakibatkan adanya mobilisasi anggota dan adanya peningkatan kohesi sosial.

Data di atas mengkonfirmasi bahwa kecenderungan kerumunan pelajar dari sekolah yang mempunyai tradisi perkelahian berbeda dalam makna subyektif kerumunannya dengan kerumunan pelajar dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi perkelahian massal atau

**Tabel 5**  
**Kebiasaan usai jam sekolah**

Kebiasaan	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Segera pulang	11	32	14
Nongkrong dulu	39	18	36

permusuhan. Dengan demikian pada Kelompok C yang pada dasarnya tidak mempunyai rasa permusuhan, maka kerumunan yang terbentuk tidak akan merupakan faktor yang mendahului bagi dilakukannya perkelahian massal.

5. Kelompok pelajar yang tidak terlibat dalam perkelahian massal juga membentuk kerumunan ketika usai sekolah. Namun kerumunan ini mempunyai "cultural focus" yang berhubungan dengan aktifitas pengisi waktu luang, seperti les pelajaran, organisasi, kegiatan ekstra kurikuler. dengan demikian tipe kerumunan yang terbentuk adalah kerumunan bukan kekerasan.

Tidak dihasilkannya perkelahian massal dari kerumunan yang terbentuk oleh kelompok pelajar yang berasal dari sekolah tanpa tradisi perkelahian, karena sebagaimana dikemukakan pada uraian butir 4 di atas adalah mereka tidak mempunyai konsep-konsep permusuhan atau konsep perkelahian dalam kerumunan itu. Sementara itu dilihat dari aktifitas rutin positif, pada Kelompok C lebih banyak dilakukan. Les pelajaran dilakukan oleh 25 kasus, sementara pada Kelompok A dan Kelompok B masing-masing adalah 2 kasus dan 1 kasus. Aktifitas ekstra kurikuler dilakukan oleh anggota Kelompok C sebanyak 20 kasus, Kelompok A 9 kasus, dan Kelompok B 11 kasus.

Banyaknya anggota Kelompok C yang melakukan kegiatan les pelajaran tambahan disebabkan kelompok ini dipersiapkan oleh orang tuanya agar dapat merebut tempat di

Perguruan Tinggi Negeri sesuai lulus SMU. Harapan peran ini tidak tampak pada Kelompok A dan Kelompok B. Sedangkan banyaknya anggota Kelompok C melakukan kegiatan ekstra kurikuler karena kegiatan tersebut di sekolahnya (Sekolah III) tersedia lebih banyak dan bervariasi dibandingkan Sekolah I, dan Sekolah II. Kegiatan ekstra kurikuler pada Sekolah I dan Sekolah II hanya ada dua yang populer bagi siswa dan itupun dilaksanakan pada hari Minggu.

6. Kelompok pelajar yang terlibat perkelahian massal dan yang tidak terlibat dalam tindakan serupa, tidak berbeda dalam orientasi nilai dan norma konvensional seperti tunduk hukum, taat kepada orang tua serta tidak menyukai kekerasan.

Berbeda dari anggapan umum bahwa pelajar yang terlibat dalam perkelahian massal merupakan pelajar yang tidak mengakui nilai dan norma konvensional, data pada Tabel 6 di bawah ini menunjukkan kebalikannya.

Terlihat pada data di atas bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok diantara ketiga kelompok tersebut dalam memberikan penilaian terhadap perkelahian massal pelajar antar sekolah. Kecuali pernyataan bahwa perkelahian massal pelajar antar sekolah dinilai sebagai tindakan wajar secara lebih banyak justru oleh pelajar dari Kelompok C yang bukan merupakan pelajar dengan tradisi perkelahian massal. Pernyataan ini ternyata merupakan reaksi terhadap disiplin yang ditetapkan oleh sekolah yaitu setiap pelajar yang

**Tabel 6**

**Penilaian pelajar terhadap perkelahian massal pelajar**

Penilaian	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Tidak berguna	23	22	22
Tidak terpuji	18	17	12
Merugikan	2	7	2
Kekanak-kanakan	—	—	1
Tindakan wajar	7	6	13
Tindakan jantan	3	2	1

terlibat dalam perkelahian massal akan dikeluarkan dari sekolah dengan tanpa memperhatikan apakah mereka merupakan korban. Disiplin ini dinilai mereka sebagai berlebih-lebihan, sebab dalam keadaan diserang adalah wajar kalau melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri ini tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh sekolah dalam mendisiplinkan siswanya.

Penilaian umum pelajar dari ketiga kelompok tersebut terhadap perkelahian massal pelajar antar sekolah menunjukkan ketidakberbedaannya dari pendapat umum masyarakat. Dan penilaian ini dilakukan dalam keadaan "ex post facto" yakni ketika mereka sedang tidak dalam keadaan melakukan perkelahian massal. Selain itu hampir seluruh pelajar dari ketiga kelompok tersebut mengetahui bahwa tindakan perkelahian merupakan pelanggaran hukum.

Para pelajar juga mengetahui bahwa para orang tuanya tidak menyukai tindakan perkelahian massal. Pengetahuan para pelajar dari ketiga kelompok tersebut dapat disimak pada Tabel 7 di bawah ini.

Data di atas menunjukkan bahwa menurut para pelajar para orang tuanya tidak menyetujui tindakan perkelahian massal pelajar. Dan mereka juga segan untuk melanggarnya. Namun pada Kelompok A terdapat kasus yang menyatakan bahwa orang tuanya tidak peduli bahkan memaklumi. Setelah ditelusuri sikap

memaklumi tersebut lebih merupakan sikap agar anaknya bertanggung jawab sendiri, dan berkelahi merupakan hal yang wajar dilakukan anak laki-laki.

### **Refleksi Teoritis**

Gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah adalah realitas sosial yang dibangun oleh para pelajar sendiri sebagai hasil pemahamannya terhadap makna subyektif ketika mereka berinteraksi dengan pihak-pihak di luar dirinya. Terlibat tidaknya seorang pelajar ke dalam perkelahian massal tergantung pada pola interaksinya dengan tipe kolektifa yang diikutinya, dan tergantung pula pada kepentingan pragmatis yang seketika sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Penelitian Slaby dan Guerra (1988) serta penelitian Keltikangas-Jarvinen dan Kangas (1988) menemukan bahwa remaja yang tidak agresif mempunyai lebih banyak pilihan dan cara-cara yang positif apabila menghadapi konflik sosial dibandingkan remaja yang sering melakukan kekerasan.

Pelajar dari kelas sosial ekonomi rendah akan mempunyai pengalaman hidup dan tingkat pengetahuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pelajar yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ketika para pelajar dari kelas sosial rendah ini berinteraksi dengan sesamanya terbentuk

**Tabel 7**  
**Reaksi orang tua terhadap perkelahian massal pelajar**

Bentuk reaksi	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Melarang	12	15	7
Tidak setuju	8	18	18
Tidak suka	13	-	7
Prihatin	3	3	8
Takut/khawatir	6	8	10
Tidak peduli	2	-	-
Maklum	6	-	-

kesadaran bersama bahwa mereka menghadapi kondisi ketidakadilan dan kondisi kesempatan hidup yang terbatas. Kendala-kendala sosial ekonomi yang menghadang mereka diketahui berada di luar diri mereka. Mereka menggugat ketidakadilan tersebut untuk “memperjuangkan nilai-nilai dan klaim atas status, kekuasaan dan sumberdaya yang langka . . .” (Cosser, 1956) dan membangun perasaan permusuhan terhadap struktur yang dirasakannya sebagai tidak adil.

Mengacu pada pandangan Durkheim (1951), masyarakat akan selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi dan dorongan integrasi. Ketika dorongan disintegrasi semakin kuat terjadi keadaan anomie yang merupakan keadaan terjadinya ketidakselarasan antara harapan masyarakat dengan pengaturan hubungan sosial yang mengakibatkan adanya ketidakpuasan dalam wujud disorientasi individu, kehidupan sosial yang destruktif, dan konflik yang meluas.

Permusuhan pelajar antar sekolah tumbuh dalam situasi semacam itu yang hanya dapat ditelusuri alasan rasionalnya melalui pemahaman tentang bagaimana kolektifa pelajar menafsirkan kondisi sosial yang dihadapinya. Sumber ketidakpuasan tersebut dipercaya berasal dari berbagai hal di luar mereka (proses eksternalisasi); terdapat proses pengidentifikasian musuh yang nyata (obyektivasi); terdapat proses pewarisan tradisi permusuhan (sosialisasi) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perkelahian massal. Perkelahian massal yang dilakukan secara berulang-ulang bila menghadapi suatu agitasi merupakan tingkah laku yang sudah terinternalisasi dan karenanya menjadi reaksi rutin tanpa perlu lagi memikirkankan asal-usulnya. Berger dan Luckmann (1967) melihat gejala tersebut sebagai proses eksternalisasi dan obyektivasi dalam rangka memberikan makna subyektif atas pengalaman hidup yang nyata.

Karena struktur sosial merupakan obyek yang abstrak, padahal permusuhan

memerlukan obyek yang nyata, maka dalam rangka memperoleh obyek yang nyata tersebut tradisi permusuhan antar kelompok pelajar sekolah terbentuk karena kebetulan masing-masing kelompok mempunyai tujuan yang saling tidak cocok (Boulding, 1962). Tentang kelompok mana yang dianggap musuh, Smelser (1962) menyebutkannya sebagai proses mencari kambing hitam terhadap keresahan yang mereka alami namun tidak berdaya untuk mengatasinya.

Eksternalisasi dan obyektivasi realitas sosial yang dihadapi kelompok pelajar dari kelas ekonomi rendah tersebut disebarluaskan kepada sesama pelajar melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi permusuhan tersebut memperoleh pengaruh kuat pada kerumunan-kerumunan pelajar yang terbentuk ketika usai jam sekolah karena dalam kerumunan terjadi interaksi tatap muka. Perasaan mendalam tidaknya permusuhan pelajar terhadap kelompok pelajar musuhnya tergantung pada dekat tidaknya keterikatan individu tersebut dengan kolektifa (kerumunan) yang diikutinya (Kriesberg, 1973). Proses sosialisasi permusuhan yang menghasilkan perkelahian massal terjadi melalui wacana terutama dalam bentuk kata-kata. Solidaritas teman, menjaga nama sekolah, label “katruk”, mau pun semboyan “kami anti lari” merupakan bentuk-bentuk wacana yang menjadi “cultural focus” kolektifa pelajar tipe kekerasan. Peranan wacana yang menghasilkan tingkah laku kolektif tersebut telah diidentifikasi oleh Klandermans (1992), Tarrow (1994), Hunt, Benford, Snow (1994), Ellingson (1995).

Perkelahian massal pelajar antar sekolah terjadi ketika muncul situasi problematis, misalnya diserang oleh kelompok pelajar musuhnya. Dengan adanya tradisi permusuhan di antara kerumunan yang sedang berkonflik tersebut, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan perkelahian massal sebagai bentuk realitas sosial yang relevan karena harus segera dilakukan sesuai dengan kepentingan pragmatis saat itu. Perlawanan semacam itu oleh de la Roche (1996) dan Black (1995) disebut

sebagai tindakan pengendalian sosial swadaya (self help) karena melakukan reaksi yang sesuai dengan norma dan nilai konvensional dianggap tidak efektif untuk saat itu.

Rumusan refleksi teoritis di muka lebih merupakan rumusan yang berkaitan dengan kondisi yang mencukupi bagi dilakukannya perkelahian massal pelajar antar sekolah. Sementara itu kondisi-kondisi prasyarat bagi dilakukannya perkelahian massal pelajar merupakan proses penggabungan kondisi permusuhan, kemampuan mobilisasi, adanya faktor pemicu, dan adanya kesempatan melakukan perkelahian massal.

Faktor determinan yang dirumuskan oleh Smelser sebagai kondisi pendorong struktural (structural conduciveness) merupakan keadaan keserbaragaman yang dihadapi oleh para pelajar di Jakarta. Keserbaragaman tersebut tercermin dari adanya sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah kejuruan. Bahkan sesama sekolah negeripun ada perbedaan antara sekolah favorit dengan sekolah non favorit. Keserbaragaman kesempatan dalam memperoleh pendidikan ini akan menghasilkan ketegangan struktural (structural strain) ketika para pelajar menyadari adanya perbedaan-perbedaan kesempatan tersebut. Keadaan struktural yang serba beragam tersebutlah yang mengawali adanya perasaan berbeda, perasaan cemburu pada kelompok pelajar yang tidak beruntung untuk menghasilkan rasa permusuhan. Dalam permusuhan ini yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari perasaan ketidakadilan, muncul adanya kepentingan-kepentingan untuk diakui keberadaannya. Faktor kepentingan ini merupakan faktor yang dikemukakan oleh Tilly. Kepentingan untuk diakui keberadaannya ini di kalangan pelajar yang mempunyai tradisi perkelahian massal, mendorong mereka memanfaatkan perkelahian massal untuk mencari pengakuan identitas di kalangan teman-temannya.

Rasa permusuhan, ketegangan struktural, dan kepentingan tersebut merupakan wacana yang tumbuh pada kelompok-kelompok

pelajar yang tidak diuntungkan dalam kondisi struktural seperti itu. Dalam sosialisasi rasa permusuhan, keadaan ketegangan struktural, dan kepentingan untuk memperjuangkan identitas memerlukan sarana untuk diwujudkan dalam perkelahian massal. Sarana untuk itu adalah kerumunan pelajar yang terbentuk usai jam pelajaran sekolah. Kerumunan ini menurut rumusan Tilly merupakan organisasi yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan.

Dengan adanya kerumunan pelajar, memungkinkan adanya mobilisasi anggota dalam memperjuangkan kepentingan atau mencari pengakuan identitas. Mobilisasi ini merupakan salah satu faktor yang determinan yang dikemukakan oleh Smelser maupun Tilly yang juga ditemukan dalam penelitian ini. Pecahnya perkelahian massal pelajar tinggal menunggu faktor pencetus yang bentuknya beraneka ragam. Bahkan pada kelompok pelajar yang tradisi permusuhan dan perkelahian massalnya tinggi, kehadiran kelompok pelajar lain yang dianggap musuh sudah merupakan faktor pemicu.

Tahapan selanjutnya dalam proses terbentuknya perkelahian massal pelajar adalah faktor kesempatan sebagaimana dikemukakan oleh Tilly. Faktor kesempatan ini yang juga ditemukan dalam penelitian, oleh Smelser dirumuskan sebagai faktor bekerjanya pengendalian sosial. Dalam kaitan ini kesempatan dilakukannya perkelahian massal pelajar antar sekolah didorong oleh adanya waktu luang yang banyak, karena tidak adanya aktifitas rutin yang positif yang perlu dilakukan, dan ketiadaan pengawasan dari agen-agen pengendalian sosial. Ketika agen pengendalian sosial sekolah mengambil tindakan keras kepada pelajar yang terlibat dalam perkelahian massal secara nyata dan konsisten, sekolah tadi mampu mengurangi kecenderungan pelajarnya untuk tidak terlibat dalam perkelahian massal. Keadaan ini ditambah dengan adanya unsur fasilitasi agar tersedia kegiatan positif pelajar dalam mengisi waktu luang melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Dengan demikian sesungguhnya faktor-faktor yang dirumuskan oleh Smelser maupun Tilly yang dijabarkan secara khusus untuk penelitian ini merupakan proses yang memang harus tersedia secara akumulatif bagi timbulnya perkelahian massal pelajar antar sekolah. Kumpulan faktor-faktor tadi merupakan kondisi prasyarat yang diperlukan bagi munculnya perkelahian massal pelajar.

### Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dan dengan pertimbangan kompleksitas masalah, maka dalam melakukan kebijakan penanggulangan masalah perkelahian massal pelajar antar sekolah perlu dirumuskan intervensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

1. Intervensi jangka pendek ditujukan untuk menghilangkan kesempatan pecahnya perkelahian massal pelajar antar sekolah. Mengingat bahwa peristiwa perkelahian massal pelajar antar sekolah akan terhenti apabila polisi datang meleraikan, maka dalam jangka pendek kenyataan ini harus difungsikan secara maksimal, yaitu menempatkan anggota-anggota polisi di tempat-tempat rawan perkelahian massal pelajar antar sekolah. Namun cara ini akan membutuhkan tenaga kerja polisi yang banyak yang mungkin tidak akan selalu dapat dilakukan.

2. Intervensi jangka menengah ditujukan dalam rangka mencegah terbentuknya kerumunan-kerumunan pelajar yang dapat merupakan lahan untuk mengembangkan "cultural focus" kekerasan. Mengingat bahwa perkelahian massal pelajar antar sekolah hanya terjadi antar kerumunan pelajar, maka faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kerumunan harus dihilangkan. Misalnya mengaktifkan kegiatan ekstra kurikuler yang bermakna bagi masa depan pelajar hingga akan meningkatkan tingkat partisipasi dalam kegiatan. Menyediakan sarana angkutan umum dalam jumlah yang mencukupi, khususnya ketika usai jam sekolah. Sebab kelangkaan sarana angkutan umum menyebabkan kerumunan pelajar yang terbentuk menjadi tidak mudah cair.

3. Intervensi jangka panjang ditujukan untuk menghilangkan tradisi permusuhan. Mengingat bahwa perkelahian massal pelajar antar sekolah terjadi antar sekolah yang mempunyai tradisi permusuhan, dan tradisi permusuhan tadi berakar pada adanya kesenjangan sosial dan adanya perbedaan kesempatan untuk menempuh kehidupan, maka melalui program-program pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, kesenjangan yang tampak antar sekolah menurut jenis maupun kualitasnya harus dihilangkan. *M*

### Kepustakaan

Berger, P.L. dan T. Luckmann

1967 *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books Doubleday & Company, Inc.

Black, D.

1995 *The epistemology of pure sociology*, *Law and Social Inquiry*, 20 hal. 829-870

Blumer, H.

1957 *Collective Behavior*, dalam J.B. Gittler (Ed.) *Review of Sociology: Analysis of Decade*, New York: John Wiley & Sons, hal. 127-158.

Cohen, A.K.

1951 *Juvenile Delinquency and the Social Structure*. Ph.D. Thesis, Harvard University.

Coser, L.

1956 **The Function of Social Conflict**, New York: The Free Press.

Durkheim, E.

1933 **The Division of Labor in Society**, New York: Macmillan.

1951 **Suicide. A Study in Sociology**. Glancoe: The Free Press.

1961 **The Elementary Forms of Religious Life**. New York: Collier Books.

Ellingson, S.

1995 *Understanding the dialectic of discourse and collective action: public debate and rioting in Antebellum Cincinnati*, **American Journal of Sociology**, 101, No. 1, July, 100-144.

Fuller, R.C. dan R.R. Myers

1941 *Some aspects of a theory of social problems*, **American Sociological Review**, 6: hal. 24-32.

Hunt, S., R.D. Benford, dan D.A. Snow

1994 *Identity fields: framing processes and the social construction of movement identities*, dalam E. Larana, H. Johnston, dan J.R. Gusfield, **New Social Movements: From Ideology to Identity**, Philadelphia: Temple University Press.

Keltikangas-Jarvinen, L., dan P. Kangas

1988 *Problem-solving strategies in aggressive and nonaggressive children*, **Aggressive Behavior**, 14, hal. 255-264.

Klandermans, B., dan D. Oegema

1987 *Potentials, Network, Motivations, and Barriers: Steps Towards Participation in Social Movements*, **American Sociological Review**, Vol. 52: hal. 519-531.

Kriesberg, L.

1973 **The Sociology of Social Conflicts**, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Lang, K., dan G.E. Lang

1968 *Collective Behavior*, **International Encyclopaedia of the Social Sciences**. Crowell Collier and Macmillan, Inc.

Marx, K.

1935 **The Civil Wars in France**. New York: International Publishers.

1958 *The Class Struggles in France, 1848-1850 dan The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, dalam K. Marx dan F. Engels, **Selected Works**. Moskow: Foreign Languages Publishing House.